

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- As'ad, Sungguh, 2004, *Etika Profesi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- S.P, Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia- UI Press, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 37, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta.

Supriadi, 2015, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015.

C. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Amir, Latifah dan Noviades, Dhill's, 2014, "Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*.

Atmojo, Yoseph Bambang Dwi, 2014, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Kota Surakarta", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Iswari, Maya, 2012, "Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta dalam Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris yang Menghadapi Perkara Pidana", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Listantri, Enggar, 2008, "Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Mezak, Meray Hendrik, 2006, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan*, Vol. V, No.3, hlm. 85.

Purwanto, 2012, "Konsep Pengembangan dan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Umbas, Marisco A., 2013, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris", *Lex Privatum*, Vol. I, No.4.

D. Internet

Sri Hartanto, "Robby Sumampow Balik Laporkan Notaris", <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/08/20/62966/Robby-Sumampow-Balik-Laporkan-Notaris>, diakses tanggal 16 November 2015.

Muhammad Haris. "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", <https://media.neliti.com/media/publications/30013-ID-pengawasan-majelis-pengawas-daerah-terhadap-notaris-setelah-berlakunya-undang-un.pdf>, diakses pada tanggal 29 Mei 2017.